



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 237/22122008
HARI : SENIN
TANGGAL : 22 DESEMBER 2008

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	INTERNASIONAL	
	RI-Malaysia signs deal on border security	3
	Langkah Ekonomi Baru Malaysia	3
	AS Tuntut Konsultasi WTO dengan China Berkaitan Promosi Merek	3
	Indonesia, Wilayah Terbaik Obama Sampaikan Pidato Bersejarah	4
	Kabinet Baru Siap Bertugas	5
	Pemimpin Finansial Dunia Klaim Ekonomi 2009 Suram	6
	Penambahan Pasukan: AS Akan Kirim 20-30 Ribu Tentara ke Afghanistan	6
II.	NASIONAL	
	A. POLITIK	
	Presiden Hadiri Perayaan Hari Ibu Ke-80	7
	Clerics choose politics over followers: BIN	8
	Pemerintah Didesak Tengah Konflik Pakistan-India	8
	Anggota DPR Diduga Korupsi dalam Penyelenggaraan Haji	9
	B. EKONOMI	
	Finance minister calls for help to fight port mafia	10
	Govt to cut transport fares	10
	Pemerintah Kaji Perpanjangan "Sunset Policy"	10

		Tantangan Ekonomi 2009 Semakin Berat	11
	C.	SOSBUD	
		Libur sekolah, jalan mulai lancar	12
		West Java women hold first congress	13
		Pendidikan Antikorupsi Perlu Dilakukan Sejak Dini	13
	D.	HANKAM	
		Ancaman Terorisme TNI-Polri Akan Latihan Tiap Tahun	14
	E.	HUKUM	
		Ketua BPK Prihatin Jajarannya Jarang Temukan Korupsi	14
		4 Pasal UU MA Bermasalah	14
		UU BHP Orang Miskin Dihambat Jadi Pintar	15
		Korupsi Sisminbankum Tersangka Baru Segera Diumumkan	17
	F.	OLAHRAGA	
		Tim Karate Indonesia Sabet Enam Emas di Malaysia	18
	G.	LINGKUNGAN HIDUP	
		Perempuan Korban Utama Perubahan Iklim	18
	III.	ARTIKEL	
		Melanggengkan Semangat Hari Ibu oleh Rina Fahmi Idris	19
		TNI: 2008, Tahun Penyempurnaan Reformasi Internal oleh M Senoatmodjo	20
		Wajah MUI dan Fatwa Rokok oleh M Luqman Hakim MA	22
	IV.	LAIN-LAIN: Tidak Ada	
	V.	EDITORIAL	
		Masuk Telinga Kanan Keluar Telinga Kiri	24

Jakarta, 22 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media

I. INTERNASIONAL :

1. RI-Malaysia signs deal on border security

Indonesia's West Kalimantan military command and the Malaysian military have signed a MoU on cooperation and supervision over border areas between the two countries.

"The MoU is a follow up on a recent agreement signed between the two countries," Maj. Gen. Tono Suratman, chief of the military command, said to *Tempointeraktif.com*.

Tono said the agreement related to the coordination of military personnel in the border areas. Both countries will each station two battalions of troops in Simanggaris (East Kalimantan), Etikong (West Kalimantan, and Biawak (Sarawak, Malaysia).

The agreement is expected to relieve tension between the two countries over illegal logging, human trafficking and terrorism.

Separately, Malaysian army representative Maj. Gen. Dato' Mazelan said the agreement left open opportunities for the two countries to cooperate on a joint land operation. (The Jakarta Post)

2. Langkah Ekonomi Baru Malaysia

Malaysia akan mengumumkan beberapa langkah pada Februari mendatang untuk memperkuat perekonomiannya. Malaysia mengalami penurunan penjualan teknologi dan angka PHK di luar perkiraan. Kenyataan itu meningkatkan kekhawatiran mengenai resesi tahun depan, menurut website berita yang berpengaruh, Senin (22/12).

Perbankan Malaysia termasuk kuat di Asia dan permintaan domestik untuk mendukung perekonomiannya, namun semakin lambannya perekonomian dunia memicu keraguan mengenai bagaimana pengaruh krisis ekonomi dipicu AS ini.

Perekonomian Asia Tenggara ini akan memperlihatkan serangkaian langkah tahun depan dan siap untuk mengumumkan paket stimulus lain senilai miliaran ringgit jika diperlukan, kata *Malaysian Insider* tanpa mengutip nara sumber. Pembantu menteri keuangan Najib Razak mengatakan dia tidak mengacuhkan rencana paket ekonomi.

Pemerintah mengumumkan paket senilai 7 miliar ringgit (2,02 miliar dollar AS) untuk menstabilkan perekonomian.

Data pemerintah menunjukkan bahwa 30.000 warga Malaysia kehilangan pekerjaan mereka sampai saat ini dan kementerian sumber daya manusia -- yang memperkirakan lonjakan pengangguran di kuartal pertama 2009 -- meminta kabinet menyediakan 100 juta ringgit untuk latihan kerja bagi para pekerja, kata laporan itu.

Pejabat pemerintah telah diminta untuk mengajukan inisiatif untuk membantu manajer kelas menengah yang kehilangan pekerjaannya tahun depan dan menciptakan 120.000 pekerjaan untuk lulusan baru.

Turunnya permintaan untuk ekspor produk teknologi telah menghantam perekonomian negara ini. Western Digital, produsen disk drive komputer terbesar kedua dunia telah menghentikan operasinya di negara bagian Serawak Malaysia dan memberhentikan 1.500 pekerjanya.

Malaysia memperkirakan ekonominya tumbuh 3,5 persen pada 2009, terendah selama delapan tahun. "Kami masih berfikir bahwa Malaysia akan terhindar dari resesi tahun depan,

namun tidak ada satu pun yang memperoleh diskon," menurut laporan itu, mengutip pejabat pemerintah yang enggan disebut namanya.

"Sebagian besar tergantung pada kondisi mitra dagang kami yang terpuruk berkelanjutan dan level kepercayaan di dalam negeri," demikian laporan itu. (Kompas)

3. AS Tuntut Konsultasi WTO dengan China Berkaitan Promosi Merek

Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan lalu mengatakan pihaknya telah meminta konsultasi dengan China di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berkaitan dengan sengketa yang melibatkan program Beijing tentang promosi merek China.

"Kami terganggu melihat bahwa China masih muncul dengan menggunakan peraturan ilegal WTO untuk mempromosikan ekspornya, berkisar dari tekstil dan kulkas hingga bir dan kacang," kata Perwakilan Dagang AS, Susan Schwab dalam sebuah pernyataan.

"Kami akan ke WTO hari ini karena kami menetapkan untuk menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menghadapi kebijakan industri yang bertujuan untuk mempromosikan secara tidak 'fair' produk bermerek China atas biaya pekerja, petani, peternak, pekerja pabrik dan pemilik hak intelektual Amerika," kata perempuan itu menambahkan.

Menyusul permintaan untuk konsultasi itu, kedua pihak akan memiliki 60 hari untuk menyelesaikan sengketa itu secara bilateral.

Jika resolusi tidak tercapai, arbitrator WTO kemudian akan diminta untuk membuat peraturan yang dapat dibanding oleh kedua pihak.

Komplain Washington ditargetkan kepada program China yang dikenal sebagai "Merek Terkenal" yang kemunculannya bertujuan untuk mempromosikan perkembangan nama merek China global dan meningkatkan penjualan produk China di seluruh dunia.

Namun program itu tampaknya termasuk subsidi ekspor yang tidak diatur dalam peraturan WTO, tuduh AS.

Subsidi itu meliputi jaminan dana untuk ekspor, pinjaman preferensial untuk eksportir, pendanaan riset dan pengembangan, serta pembayaran biaya yang lebih rendah untuk asuransi kredit ekspor, kata Washington menambahkan.

Meksiko juga meminta untuk konsultasi WTO dengan China mengenai masalah yang sama hari ini, kata AS. (Republika)

4. Indonesia, Wilayah Terbaik Obama Sampaikan Pidato Bersejarah

Indonesia adalah pilihan terbaik bagi Presiden AS Barack Obama untuk menyampaikan pidato bersejarahnya tentang perbaikan hubungan AS dan dunia Islam karena modal sosial budaya, posisi strategis, dan sistem politiknya yang demokratis. "Sangat tepat kalau Indonesia dijadikan tempat oleh Obama untuk mulai membangun citra damai itu karena Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang setara dengan jumlah penduduk muslim dari 14 negara Timur Tengah," kata akademisi muslim Indonesia di Universitas Queensland (UQ), Akhmad Muzakki.

Kepada ANTARA di Brisbane, Senin (22/12), dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya yang sedang merampungkan studi doktornya di UQ itu mengatakan, selain faktor penduduk, maka modal sosial budaya masyarakat Indonesia yang lebih bisa menerima perbedaan dan terbiasa dengan toleransi adalah kekuatan lain yang patut dipertimbangkan Obama.

"Dengan negara yang memiliki modal sosial budaya seperti Indonesia ini, pemerintahan Barack Obama harus menjalin kerja sama yang baik. Indonesia juga merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia. Posisi politiknya di dunia internasional, khususnya Asia, pun cukup disengani," katanya.

Lebih dari itu, seandainya Presiden Obama memilih Indonesia, tempat terbaik baginya untuk menyampaikan pidato bersejarahnya itu adalah Pulau Dewata, Bali. Dengan memilih Bali, masyarakat dunia pun bisa melihat agenda maupun tujuan penting kampanye Obama itu.

Masyarakat internasional dapat melihat betapa Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslimin turut menjadi korban dari praktik radikalisme oleh segelintir orang di Bali dan beberapa tempat lain di Indonesia. "Korban terbanyak dari aksi radikalisme itu adalah juga Muslim, dan Bali tercatat dalam sejarah sebagai tempat yang dua kali mengalami aksi kekerasan (kelompok radikal)," katanya.

"Di daerah turis utama dunia, Bali, yang berpenduduk mayoritas Hindu dan tetap eksis dengan tradisi agama dan budayanya itu di Indonesia yang mayoritas Muslim, maka Barack Obama bisa menyampaikan keinginan AS untuk melakukan rekonsiliasi dengan dunia Islam," kata Akhmad Muzakki. Akhmad Muzakki mengatakan, terpuruknya citra AS di mata komunitas Muslim di banyak negara dan kemudian memicu sikap anti-Amerikanisme tidak dapat dilepaskan dari sepak-terjang pemerintahan dan sosok Presiden George W. Bush yang "cowboy".

Namun, pemerintah AS di masa Bush cenderung salah membaca sikap anti-Amerikanisme ini karena mereka yang bersikap anti dicap Amerika sebagai orang yang "mengalami radikalisasi dan ekstremisasi padahal mereka yang anti-Amerika tidak selalu mempunyai pemahaman ekstrimisme". Sikap anti-Amerikanisme itu lebih disebabkan tidak tahan dengan aksi dan sikap kesewenang-wenangan AS selama pemerintahan Bush.

"Kasus pelemparan sepasang sepatu terhadap Presiden Bush di Irak oleh wartawan baru-baru ini kembali menjadi bukti dan sepatutnya dibaca oleh Amerika sebagai penanda simbolik. Munculnya sikap anti-Amerikanisme itu bukan apa-apa kecuali disebabkan oleh sikap 'cowboy'-nya Presiden Bush," katanya.

Dalam konteks inilah keinginan Presiden terpilih Barack Obama untuk memperbaiki hubungan AS dengan Dunia Islam sangat positif. "Hal pertama yang harus dimunculkan pemerintahan Obama adalah interaksi yang damai untuk mewujudkan koeksistensi damai antara Amerika dan non-Amerika, termasuk Dunia Islam."

"Sikap 'cowboy'-nya Bush sebagai pemicu utama sikap anti-Amerikanisme ini harus diperhatikan Obama. Dan, Indonesia menjadi tempat penting bagi Obama untuk mulai membangun citra damai Amerika itu," katanya. (Kompas)

5. Kabinet Baru Siap Bertugas

Menjelang pelantikan, kabinet baru Thailand pimpinan Perdana Menteri (PM) Abhisit Vejjajiva merumuskan kebijakan rekonsiliasi nasional.

Sejumlah menteri penting dari Partai Demokrat melakukan pertemuan selama dua hari, berakhir Sabtu (20/12) lalu di sebuah tempat di Pulau Ko Samui untuk membahas kebijakan pemerintah yang akan diambil. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah kritikan atas penunjukan beberapa tokoh menteri yang dinilai kurang berpengalaman di bidangnya.

"Setelah pelantikan besok (hari ini), perdana menteri mungkin akan mengadakan rapat tentang kebijakan pemerintah sebelum sidang kabinet pertama kalinya pada Selasa (besok) untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan tersebut," ungkap Deputy Menteri Dalam Negeri Thaworn Senneam kemarin.

Pada Sabtu (20/12) lalu, Abhisit mengumumkan kabinetnya sepekan setelah Raja Bhumibol Adulyadej melantiknya sebagai PM menggantikan Somchai Wongsawat. Raja Bhumibol juga secara resmi telah menandatangani perintah penyusunan kabinet tersebut. Lebih dari 50% kabinet bentukan Abhisit merupakan wajah-wajah baru. Dari 30 jabatan menteri di kabinet, 24 di antaranya dipegang oleh tokoh yang baru pertama kali berkiprah di pemerintahan.

Untuk memimpin tim ekonomi dalam memulihkan perekonomian Thailand, Abhisit mempercayakan jabatan menteri keuangan kepada Korn Chatikavanij, kawan sebayanya di Oxford. Korn sebelumnya bekerja di bagian investasi Bank JPMorgan Chase. Beberapa kelompok pengusaha meragukan tim ekonomi bentukan Abhisit yang ditugaskan untuk memulihkan kembali perekonomian di Thailand.

Mereka telah mengecam penunjukan sebagian nama yang tergabung dalam tim pemulihan ekonomi Thailand. Kelompok pengusaha Thailand pada Jumat (19/12) menyatakan kekecewaannya terhadap penunjukan menteri perindustrian dan perdagangan. Seperti dilaporkan media lokal, kekecewaan para pengusaha itu mencuat setelah Abhisit menunjuk Charnchai Chairungruang sebagai menteri perindustrian.

Sementara Pornthiwa Nakasai masih tetap menjabat sebagai menteri perdagangan. Perbaikan ekonomi di Thailand menjadi agenda mendesak dalam pemerintahan Abhisit. Menteri keuangan pada pemerintahan sebelumnya mengakui, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan berjalan lambat sekitar dua persen. Itu disebabkan aksi demonstrasi selama beberapa bulan yang telah melumpuhkan sendi perekonomian di Thailand.

Selain tim ekonomi yang mendapat kecaman, beberapa menteri lainnya juga dinilai tidak berpengalaman dan sesuai. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri Kasit Piromya, anggota demonstran vokal dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang menduduki Bandara

Internasional Suvarnabhumi di Bangkok pada akhir November lalu. Penunjukan Kasit ini tentunya mengundang sejumlah pertanyaan dari berbagai kalangan tentang komitmen Abhisit untuk mendekati para pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra.

Padahal, Abhisit sebelumnya berjanji akan merangkul para pendukung Thaksin sebagai bentuk dari rekonsiliasi nasional. Kasit telah menegaskan bahwa kebijakan yang diambilnya tidak dipengaruhi PAD. Selain itu, Kasit berjanji bahwa kebijakan luar negerinya itu tidak terpengaruh dengan ambisi pribadinya di bidang bisnis, seperti yang pernah dituduhkan Thaksin.

Pendukung Thaksin tetap mengaku kecewa dengan pemerintahan baru pimpinan Abhisit. Mereka mengancam akan melancarkan aksi unjuk rasa pada 28 Desember, sebelum Abhisit menyampaikan pidato di depan anggota parlemen.

Polisi menyatakan kesiapannya menghalau rencana ribuan pendukung Thaksin yang ingin menggagalkan acara di parlemen itu. Aksi tersebut berhasil dilakukan demonstran PAD pada 7 Oktober lalu. (Koran Sindo)

6. Pemimpin Finansial Dunia Klaim Ekonomi 2009 Suram

Para pemimpin finansial internasional melihat ekonomi tahun 2009 suram, dan memperingatkan bahwa ketika itu keadaan akan bertambah buruk dari tahun ini meskipun telah dilakukan rencana langkah stimulus ekonomi.

Ketua Dana Moneter Internasional (IMF), Dominique Strauss Kahan memprediksi "keadaan sangat gelap" pada 2009 akan bertambah buruk, jika negara-negara gagal mengantisipasi memerangi krisis finansial yang sedang terjadi.

"Ramalan kami sangat gelap, namun itu akan akan bertambah gelap jika stimulus fiskal yang tepat gagal diterapkan," kata Dominique, Senin (22/12).

IMF telah meminta stimulus fiskal global sekitar dua persen dari pendapatan per kapita, yang menyamai sekitar US\$ 1,2 triliun. Pesimistis Dominique diamini Gubernur Bank Spanyol, Miguel Angel Fernandez Orodenez.

Menurut Angel, dunia akan menghadapi keruntuhan finansial yang tidak pernah terjadi seperti malaise depresi besar pada 1930. Angel menyatakan bahwa pinjaman antarbank di pasar tidak akan berfungsi, yang akan menimbulkan lingkaran setan di dalam aktivitas konsumen, dunia bisnis, investor, dan kegiatan bank secara dasar akan membeku.

Namun masih ada harapan untuk menghentikan krisis, di mana Presiden Amerika terpilih Barack Obama yang mencanangkan membuka tiga juta lapangan pekerjaan baru, untuk mendorong roda perekonomian. (Tempo Interaktif)

7. Penambahan Pasukan: AS Akan Kirim 20-30 Ribu Tentara ke Afghanistan

Amerika Serikat (AS) berencana mengirim antara 20.000 dan 30.000 tentara tambahan ke Afghanistan pada musim panas 2009 mendatang.

Dengan demikian, jumlah tentara AS di Afghanistan akan meningkat dari 31.000 menjadi lebih dari 50.000 tentara.

Jenderal David McKiernan, komandan AS di Afghanistan, telah minta lebih dari 20.000 tentara tambahan untuk menghadapi peningkatan kekerasan gerilyawan, termasuk empat brigade tempur, satu brigade penerbangan, dan pasukan dukungan lain.

"Tentara yang kami minta dalam pembicaraan dengan Jenderal McKiernan adalah apa yang kami butuhkan untuk masa depan yang diduga. Jadi saya tidak melihat penambahan lebih besar dalam hal ini ketimbang 20.000 hingga 30.000 orang," kata pemimpin kepala staf gabungan AS, Mike Mullen, di Kabul, Sabtu.

Mullen berharap tentara tambahan itu dapat dikerahkan pada pertengahan 2009. "Kami tampaknya akan memperoleh mereka di sini pada musim semi ini, tapi tentu saja pada awal musim panas adalah yang terakhir," ujarnya.

Sebelumnya, seorang pejabat militer AS mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Robert Gates telah memerintahkan pengerahan satu brigade udara dengan 2.800 tentara ke Afghanistan pada tahun depan. "Ini awal dari sumber persyaratan yang dia (McKiernan) minta," kata pejabat itu.

Brigade udara, yang terdiri dari campuran helikopter serang dan angkut, akan dikerahkan ke Afghanistan setelah Januari mendatang.

Namun, dalam wawancara yang disiarkan pekan lalu, Gates mengindikasikan akan ada batas bagi penambahan militer AS. Dia mengaku khawatir kehadiran jumlah tentara yang lebih besar juga menimbulkan risiko lebih besar bagi rakyat Afghanistan untuk berbalik melawan mereka sebagai pasukan pendudukan.

"Saya pikir kita dapat memenuhi persyaratan komando di Afghanistan, komandan kita, Jenderal McK, bagi empat brigade tim tempur dan satu tim tempur penerbangan, tanpa merobohkan keseimbangan itu," katanya.

Dari Kabul dilaporkan, empat tentara NATO di Afghanistan tewas dalam serangkaian serangan bom pinggir jalan secara terpisah.

Tiga prajurit Denmark tewas dan lainnya cedera ketika kendaraan lapis baja mereka diledakkan di distrik Gerishk di provinsi Helmand selatan, kata kementerian pertahanan Denmark dalam pernyataannya.

Tentara yang terluka segera diangkut ke rumah sakit militer NATO di wilayah tersebut. "Para prajurit ini meninggal secara terhormat, membantu keamanan di Afghanistan," kata Kapten Mark Windsor, juru bicara Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) di wilayah selatan, dalam pernyataannya.

Dalam serangan terpisah, seorang prajurit Belanda juga tewas dan lainnya luka-luka akibat ledakan bom pinggir jalan di provinsi terdekatnya, Uruzgan, demikian diinformasikan pihak militer Negeri Belanda.

Gerilyawan Taliban menyatakan bertanggungjawab atas serangan-serangan tersebut. Demikian pernyataan yang disiarkan di situs internet mereka.

Korban terakhir ini menjadikan 21 prajurit Denmark tewas di Afghanistan sejak jatuhnya rezim Taliban pada akhir 2001. Sedangkan tentara Belanda yang tewas adalah yang ke-18 sejak dimulainya misi Belanda di sana.

Sekitar 700 tentara Denmark bertugas di negara itu di bawah bendera ISAF, sedangkan 1.200 tentara Belanda ditempatkan di Afghanistan. Sebagian besar tentara dari kedua negara digelar di wilayah selatan yang bergolak.

Pemberontak meningkatkan serangannya di Afghanistan dan hampir 70.000 tentara internasional berada di sana dalam beberapa bulan belakangan ini. Lebih dari 280 prajurit, sebagian besar tentara AS, tewas pada tahun ini.

Sementara itu, pemimpin bayangan Taliban Mullah Muhammad Omar mengajukan syarat untuk mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian di negara yang dilanda perang itu. Demikian menurut berita media massa setempat, Sabtu. (Suara Karya)

I .

NASIONAL :

A. POLITIK :

1. Presiden Hadiri Perayaan Hari Ibu Ke-80

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin pagi, menghadiri acara peringatan ke-80 Hari Ibu dan Pencanangan Tahun Indonesia Kreatif 2009.

Peringatan Hari Ibu tahun 2008 bertema "Dengan Semangat Satu Abad Kebangkitan Nasional, Kita Tingkatkan Kiprah Perempuan Indonesia Dalam Membangun Karakter dan Pekerti Bangsa Menuju Indonesia Yang Adil, Demokratis, dan Sejahtera".

Dalam acara tersebut Presiden didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla.

Menurut keterangan dari Bagian Humas Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, tema peringatan Hari Ibu kali ini sekaligus menunjukkan peran perempuan bukan hanya sebagai seorang ibu, namun juga pendidik utama dalam keluarga untuk menanamkan nilai-nilai dan karakter pekerti bangsa kepada anak-anak sejak dini di antaranya nilai-nilai saling menghargai antar sesama manusia, dan kerja keras serta nilai-nilai untuk menjaga diri dari bahaya yaitu melalui hidup yang tertib, teratur dan baik.

Peringatan Hari Ibu merujuk pada dimulainya Kongres Perserikatan Perempuan Indonesia yang pertama pada 22 Desember 1928, mana perempuan Indonesia sudah menunjukkan perannya untuk mewujudkan Indonesia merdeka serta mempertahankannya.

Pada acara itu juga diserahkan penghargaan kepada tiga tokoh perempuan, yaitu Prof. Dr. Ir. Sri Kumalaningsih, M.App, Sc (guru besar Universitas Brawijaya Malang) sebagai tokoh berprestasi dalam bidang pengembangan teknologi pangan tradisional dari potensi daerah lokal, Irvati M Sudiarmo, sebagai pianis berprestasi internasional yang merupakan seorang pencinta dan pengajar seni dan Trisutji Djuliaty Kamal (pianis dan komponis handal yang telah menciptakan lebih dari 200 karya komposisi untuk piano).

Dalam peringatan Hari Ibu tahun 2008 juga akan dilakukan penandatanganan Peraturan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang: "Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu selama Waktu Kerja di Tempat Kerja".

Peraturan bersama itu dimaksudkan agar hak-hak perempuan sebagai pekerja dan untuk mendorong peningkatan pemberian ASI di Indonesia terpenuhi secara maksimal. (Antara)

2. Clerics choose politics over followers: BIN

The government has asked Muslim clerics to avoid actively participating in politics, as it will keep them from serving their followers and will threaten social unity.

After a series of meetings with Muslim leaders in the Central Java town of Pati on Saturday, he was concerned about the fact that many clerics have turned to politics, said State Intelligence Agency (BIN) chief Syamsir Siregar.

"Nowadays many clerics have chosen their own political affiliation. This is regrettable as people will find it difficult to find role models and now the clerics have put their political interests above the needs of the people," Syamsir said as quoted by Antara news agency.

However, democracy allows the clerics as individuals to exercise their political rights, he said.

"But the clerics' decisions to turn to practical politics should not be a hardship for Muslims and cause the disintegration of Islamic boarding schools," Syamsir said.

During his visit to the town, known as the stronghold of Nahdlatul Ulama (NU), the country's largest Muslim organization with over 35 million members, Syamsir held a tete-a-tete meeting with prominent NU figure Sahal Mahfudz, who chairs the Indonesian Ulema Council. Syamsir also met with local Muslim clerics.

It is well known that Muslim clerics have been involved in politics long before independence in 1945. They founded the NU Party, which finished among the top four in inaugural general elections in 1955.

NU joined the United Development Party (PPP) when the New Order government simplified the political party system in 1972.

In 1984, under then chairman Abdurrahman "Gus Dur" Wahid, NU decided to quit politics. But it has maintained its influence in politics ever since, as evidenced by the formation of the National Awakening Party (PKB) in 1998 and the election of Gus Dur as the fourth president in 1999.

Of the 38 political parties which have qualified for the 2009 elections, three of them -- PPP, PKB and the National Awakening Party -- claim to represent the political aspirations of NU. Muslims at the grassroots level are having difficulties in seeking guidance from their clerics, who have been busy with their political activities, Syamsir said.

"Islamic boarding schools have been reduced to a battle field for various interests. This solemn tradition (of boarding schools) has now been disrupted by political activities."

Pati's prominent cleric, Asmuj, who runs Salafiyah Islamic boarding school, agreed with Syamsir.

"Today there are many clerics and ulemas pursuing political interests at the expense of their followers' needs for moral guidance," Asmuj said.

Syamsir had visited the boarding school as part of the school's activities to commemorate the Islamic New Year, which falls on Dec. 29. (The Jakarta Post)

3. Pemerintah Didesak Tengahi Konflik Pakistan-India

Kalangan DPR meminta pemerintah mengambil peran sebagai mediator konflik India dan Pakistan. Pasalnya, kedua negara tersebut merupakan tujuan ekspor Indonesia.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR Effendi Chorie berpendapat posisi Indonesia sangat strategis bagi negara-negara dunia, termasuk India dan Pakistan. Menurutnya Indonesia memiliki hubungan sejarah yang baik dengan India dan Pakistan.

"Dulu Soekarno menggalang kerja sama dengan dua negara tersebut, mulai Konferensi Asia-Afrika hingga terbentuknya organisasi non blok," kata Effendi di Jakarta, Minggu (21/12).

Dengan fakta sejarah itulah, tak berlebihan jika Indonesia turun tangan ikut mendamaikan sengketa kedua negara. Apalagi, mayoritas penduduk Indonesia dan Pakistan sementara jumlah muslim di India juga tidak sedikit.

"Dengan pendekatan kultural, Indonesia bisa berperan lebih banyak," imbuh anggota Komisi I DPR ini.

Menurut Effendi, Indonesia menganut politik bebas aktif dalam pergaulan internasional. Dengan demikian, peran Indonesia sangat ditunggu untuk menjadi penengah bagi negara-negara yang dilanda konflik.

Pendapat serupa disampaikan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Musa Ichwansah. Menurutnya, hubungan India-Pakistan saat ini ibarat api dalam sekam yang terus membara terlebih pasca aksi terorisme di Mumbai beberapa waktu lalu.

"Kecurigaan secara terus menerus ini berpotensi menjadi konflik terbuka dikemudian hari. Apalagi, kedua negara mempunyai nuklir. Kalau sampai terjadi perang, bisa dibayangkan dampaknya," jelas Musa. (Media Indonesia)

4. Anggota DPR Diduga Korupsi dalam Penyelenggaraan Haji

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Komisi VIII diadukan ke Badan Kehormatan (BK) DPR, karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2006.

Pengaduan tersebut disampaikan Koordinator Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, yang diterima Ketua BK DPR Irsyad Sudiro, Jumat (19/12).

Menurut Ade, korupsi yang dilakukan anggota DPR tersebut adalah dalam bentuk gratifikasi perjalanan dinas dari Menteri Agama kepada dua anggota DPR berinisial ST dan SA. Keduanya masing-masing mendapat dana US\$ 2.845 atau sekitar Rp 25 juta.

Selain itu, juga ada bukti laporan uang insentif dan transportasi yang dikeluarkan Departemen Agama (Depag) ke sejumlah anggota DPR dalam rangka rapat-rapat Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). "Jumlahnya mencapai Rp 500 juta yang dibagi ke 15 orang," ujarnya. Ade menjelaskan uang BPIH tersebut berasal dari dana yang dipungut dari 205.000 jamaah haji, yakni Rp 6.000 per orang. Jumlah totalnya mencapai Rp 1,2 miliar.

Saat ditemui terpisah, anggota Komisi VIII yang juga merupakan salah satu pengusul Hak Angket Haji 2008, Abdullah Azwar Anas, kepada SH mengatakan, laporan tersebut bukanlah serangan balik dari Depag karena ancaman hak angket dari DPR. Sebelum rencana hak angket, dia mengaku telah bekerja sama dengan ICW untuk membongkar dugaan korupsi. "Kami membantu menghimpun data-data," katanya.

Laporan ini, kata Anas semakin membuktikan adanya ketidakberesan dalam penyelenggaraan ibadah haji selama ini. Namun, menyangkut rencana angket haji ini akan tetap berjalan dan fokus pada penyelenggaraan haji tahun 2008.

ICW juga menyoroti model pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai monopolistik serta diikuti dengan keterutupan dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran. Pola-pola atau model pengelolaan inilah yang membuat praktik-praktik korupsi akan mudah masuk ke dalamnya.

Dalam rentang tahun 2002 hingga 2005, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan banyak penyimpangan yang berakibat negara dirugikan setidaknya senilai Rp 700 miliar.

"Faktanya, dugaan korupsi ini tidak hanya dinikmati oleh pejabat di Depag saja, tapi juga di Komisi VIII yang seharusnya melakukan pengawasan terhadap mitranya ini," kata Ade.

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Tiurlan Basaria Hutagaol mengatakan, laporan tersebut akan segera dipelajari. "Kemungkinan setelah reses, akan kami pelajari," kata Tiurlan. Dia menyebutkan jika bukti-bukti cukup kuat, BK akan segera melakukan tindakan. (Sinar Harapan)

B. EKONOMI :

1. Finance minister calls for help to fight port mafia

Finance Minister Sri Mulyani has called on local business people to help her ministry fight what she called the "port mafia".

"Currently, I'm fixing our port, which includes reforming the customs office. If any of you gentlemen find our officers are asking for money, please don't pay them," Sri Mulyani told members of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (Kadin) on Sunday.

She said that Kadin should help the government root out the port mafia to protect domestic industries.

"We need to make the port mafia a known enemy of Kadin and the government. Kadin has to help the government because, if illegal goods enter the country, they will be in direct competition with you," she said.

Earlier, Kadin Chairman MS Hidayat suggested that the government protect domestic markets by imposing restrictions on imports, especially on products that could be produced domestically.

"Strengthening domestic market should be priority number one. The import of all items that could be produced domestically must be restricted or even stopped, of course with regulations," Hidayat said. (The Jakarta Post)

2. Govt to cut transport fares

The government is planning to cut transportation fares by 5.22 percent following recent drops in gasoline and diesel fuel prices, Transportation Minister Jusman Syafii Jamal said Sunday.

"We have calculated that we can cut transportation fares by up to 5.22 percent," he said to the Antara news agency.

The minister, however, said that the regional administration would decide their own inter-city and inner city transportation fares.

"Some administrations were quick to response to the fuel price cuts and have been calculating new transportation fares," he said.

"West Java administration, for example, has proposed a 4 to 5 percent transportation cut. The new fares are waiting to be approved," he said. (The Jakarta Post)

3. Pemerintah Kaji Perpanjangan "Sunset Policy"

Pemerintah melalui Departemen Keuangan akan mengkaji perpanjangan masa "sunset policy" yang seyogyanya berakhir pada 31 Desember 2008.

"Kalau secara Undang-undang, perpanjangan itu tidak memungkinkan, kita sedang mencoba melihat kalau secara celah administrasi yang memungkinkan treatment jika itu dilakukan," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Munas V Kadin di Jakarta.

Sri Mulyani yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengatakan, semua pemangku kepentingan khususnya Direktorat Jendral Pajak Depkeu segera membahas usulan kalangan dunia usaha untuk memperpanjang kebijakan pajak tersebut hingga Maret 2009.

"Sunset policy" merupakan fasilitas perpajakan yang diatur dalam Undang-undang no.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dimana pengampunan pajak (tax amnesty) itu berakhir pada 31 Desember 2008.

"Saya rasa mungkin ada (celah dalam proses administrasi) jika melihat terjadinya penurunan harga-harga sekarang," kata Menteri.

Fasilitas sunset policy merupakan kebijakan pembetulan surat pemberitahuan pajak penghasilan pada tahun 2006 dan tahun sebelumnya tanpa diberi sanksi administratif kepada Wajib Pajak (WP) perseorangan maupun badan usaha.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, MS Hidayat menilai, tujuan permintaan perpanjangan kebijakan perpajakan tersebut agar pelaku usaha dapat lebih mempersiapkan persyaratan dokumen.

"Sekarang ini dunia usaha sedang menanggulangi krisis di perusahaannya masing-masing, karena sunset policy itu prosedurnya panjang, banyak formulir blanket yang harus dilengkapi," ungkap Hidayat.

Ia menegaskan, pada intinya kalangan dunia usaha sangat mendukung adanya kebijakan perpajakan tersebut, "Kita hanya minta penutupannya ditunda minimal hingga 3 bulan (Maret 2009)". (Jurnal Nasional)

4. Tantangan Ekonomi 2009 Semakin Berat

Krisis keuangan global akan membuat tantangan ekonomi semakin berat pada semester I/2009. Pemerintah harus segera melaksanakan langkah nyata demi menyelamatkan perekonomian nasional.

"Kiranya cukup wajar apabila sektor usaha di Indonesia menantikan langkah-langkah nyata yang cepat, jelas, dan strategis yang dapat meredam kemungkinan hard landing ataupun perlambatan pertumbuhan ekonomi secara radikal," ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat pada pembukaan Musyawarah Nasional V Kadin Indonesia di Jakarta kemarin.

Dia mencontohkan serangkaian kebijakan konkret yang telah dilakukan negara lain seperti penjaminan penuh simpanan di perbankan (blanket guarantee) dan stimulus fiskal untuk mendorong sektor ekonomi kunci. Negara-negara lain juga telah menurunkan suku bunga pinjaman secara radikal dan memberikan dana talangan (bailout) dalam jumlah besar.

"Banyak negara di Asia, Amerika, dan Eropa telah melakukan respons konkret yang agresif,"katanya. Hidayat dalam kesempatan tersebut menyampaikan sembilan rekomendasi yang diharapkan dapat dikaji bersama sebagai rencana aksi pada 2009 (lihat info grafis halaman 11).

Kesembilan rekomendasi itu antara lain pemantapan stabilitas ekonomi nasional, percepatan penyediaan paket stimulus yang signifikan dan mencakup insentif perpajakan untuk sektor padat karya dan usaha kecil menengah, serta pelaksanaan ekspansi fiskal yang efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, pemerintah akan bertanggung jawab dalam pemulihan dan pengembangan ekonomi nasional ke depan. Pemerintah menyiapkan manajemen aksi dalam mengantisipasi krisis dan siap dengan langkah darurat manakala keadaan berubah tidak sesuai dengan harapan.

"Pekerjaan yang sangat penting dan strategis saya pimpin langsung, yang sangat fundamental saya juga pimpin langsung karena Presidenlah yang bertanggung jawab terhadap pemulihan perekonomian di negeri ini,"ujar Presiden SBY. Saat menghadiri Munas Kadin, Presiden SBY didampingi Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Munas V Kadin tahun ini mengambil tema "Membangun Ekonomi Daerah untuk Kebangkitan Ekonomi Nasional". Presiden menuturkan, pemerintah menghadapi sejumlah dilema dalam upaya mengatasi krisis global. Dilema itu antara lain masalah pengurangan pajak, mendorong pertumbuhan, dan pengadaan jaring pengaman sosial.

"Tapi jangan khawatir, kita tidak terkurung, kita tidak terkunci dengan dilema," tandasnya. Menurutnya, ada tiga pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah dan dunia usaha, yakni menjaga sektor riil, mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Dalam upaya mencegah PHK, pemerintah akan terus mengembangkan usaha dan insentif bagi sektor riil. Kendati begitu, menurut Presiden, paket stimulus akan diberikan secara realistis. Paket stimulus yang tidak realistis hanya mengakibatkan kebangkrutan negara dan menimbun beban di masa depan.

Dia mencontohkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kemudian menjadi masalah hukum dan tidak tuntas penanganannya sampai saat ini. "Selalu ada keterbatasan dalam bujet dan kemampuan fiskal kita. Kita mengharapkan paket stimulus seperti China, tetapi kita tidak mampu. Kita tidak bisa berharap sesuatu yang tidak realistis, nanti terjadi kebangkrutan,"ujarnya.

Jangan Cengeng

Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menyesalkan dunia usaha yang selalu mengajukan rekomendasi ekonomi dengan mengacu pada kondisi krisis dan kebijakan antisipatif negaranegara lain. Padahal, kondisi krisis dan kebijakan antisipasi yang diperlukan kegiatan ekonomi domestik relatif berbeda.

"Kadin Indonesia sebetulnya confuse membaca krisis di negara-negara maju, tapi minta stimulusnya di sini. Lalu Anda kemudian bilang, kenapa stimulus pemerintah nggakkonkret, kurangkonkret seperti apa? Setiap saya ngomong seolah nggak pernah di-dengerin,"katanya.

Menurut Sri Mulyani, negara-negara yang relatif lebih maju dibandingkan Indonesia tingkat pertumbuhannya rata-rata minus 0,5% selama dua kuartal terakhir 2008. Sementara ekonomi dalam negeri masih tumbuh di level 6% dengan inflasi 2008 kemungkinan di bawah 11%. Dia meminta agar pelaku usaha tidak cengeng dan suka merengek kepada pemerintah terkait situasi sulit ekonomi. Demikian pula sikap pesimistis yang kerap ditonjolkan untuk meminta keringanan pajak.

"Tabahnya kurang, selalu merengekreng," katanya. Pemerintah, kata Sri Mulyani, bukannya tidak tahu situasi dan apa yang bisa dilakukan. Namun, kebijakan antisipasi yang akan diterapkan pemerintah akan disesuaikan dengan situasi terkini. "Jadi Kadin harus sabar untuk mendengar. Jangan terlalu banyak ngomong karena selama ini Kadin banyak ngomong, tapi dengarnya kurang,"kata dia.

Dia menambahkan, pemerintah mengalokasikan belanja modal yang besar untuk program-program padat karya di bidang infrastruktur tahun depan. Dalam APBN 2009, menurut Sri Mulyani, jumlahnya mencapai Rp96 triliun, terdiri atas Rp72 triliun yang dilaksanakan oleh departemen dan Rp24 triliun oleh pemerintah daerah.

Rawan PHK

Di bagian lain, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mencatat sembilan provinsi yang paling berat dalam menghadapi dampak krisis keuangan global, khususnya dampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Menakertrans Erman Suparno menyatakan, sembilan provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. "Pada wilayah tersebut terdapat industri padat karya yang rentan terhadap krisis keuangan global yang berdampak pada rasionalisasi dan efisiensi pekerja atau buruh," katanya saat sarasehan wartawan unit Depnakertrans di Bogor, Jawa Barat, kemarin. Erman mengungkapkan, data yang dihimpun Depnakertrans hingga 5 Desember 2008 telah terjadi PHK atas 17.418 pekerja.

Sementara yang direncanakan akan di-PHK sebanyak 23.927 orang. "Sedangkan jumlah pekerja yang sudah dirumahkan sebanyak 6.597 orang dan yang akan dirumahkan sebanyak 19.091 orang,"katanya. (Koran Sindo)

C. SOSBUD

1. Libur sekolah, jalan mulai lancar

Jalan-jalan di Jakarta hari ini mulai lancar karena libur sekolah hingga awal tahun depan. Di sejumlah kawasan yang biasanya padat merayap kini

Sepanjang Jl. Gatot Subroto, Sudirman dan Thamrin yang biasanya padat hari ini relatif lancar. Dari arah Pancoran menuju kawasan Sudirman hanya butuh waktu beberapa menit.

Di Jl. Mampang Prapatan menuju Kuningan yang biasanya menjadi jalur neraka hari ini relatif lancar. "Anak sekolah mulai libur jadi jalan-jalan lebih lancar, tak biasanya di awal pekan ini kondisi lalu lintas tak terlalu padat," kata Deddy, warga Depok yang melalui jalan Pasar Minggu-Pancoran, Jakarta Selatan, hari ini.

Di jalan protokol yang menerapkan pola "3 in 1" tampak banyak pengguna kendaraan yang tak mematuhi. Mereka menggunakan jalur kanan untuk menghindari pemantauan petugas kepolisian, sementara para joki yang menawarkan jasa di sebelah kiri jalan terpaksa gigit jari. Hal itu terlihat di kawasan Pancoran, sepanjang Jl. Gatot Subroto dan Jl. Prof. Dr. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan.

Sementara itu, pengumuman dari Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengenai jam masuk sekolah pada pukul 06.30 mulai disosialisasikan. Sejak pekan lalu sejumlah SMA Negeri, telah menyebarkan informasi bahwa pada 5 Januari 2009 akan memajukan jam masuk sekolah

menjadi pukul 06.30 WIB. "Ini sesuai dengan peraturan yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta," kata Edi Sumarto, kepala sekolah SMAN 28 Jakarta. (Bisnis Indonesia)

2. West Java women hold first congress

Some 350 women representing various organizations, political parties and individuals joined on Sunday the first-ever West Java Women Activists Congress held at the Indonesia Menggugat building on Jl Perintis Kemerdekaan.

Held to commemorate Mother's Day which falls on Dec. 22, the congress was aimed at empowering women from all sectors of development to help improve the future of women in the province.

Chairwoman of the conference, Hetifah Siswanda, said West Java women were facing various issues including economic problems, political accessibility, women's health and domestic violence.

"We are not going to establish a new NGO (non-governmental organization) after this, but we want to empower women to facilitate mutual help instead," Hetifah said at the conference.

Chairwoman of West Java Family Welfare Movement Netty Heryawan who officially opened the congress said, it was time for women in the province to be more concerned with fellow women's problems. (The Jakarta Post)

3. Pendidikan Antikorupsi Perlu Dilakukan Sejak Dini

Pendidikan antikorupsi memang seharusnya dilakukan sejak dini kepada anak usia sekolah untuk memutus mata rantai kejahatan yang banyak dilakukan para pemegang kekuasaan.

"Korupsi sudah masuk ke berbagai sisi kehidupan masyarakat, sehingga harus upaya memutus mata rantainya, dan itu bisa dilakukan dengan memberikan pendidikan antikorupsi kepada anak usia sekolah," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, Senin (22/12).

Menurut dia, merupakan langkah yang bagus jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun institusi kejaksaan sudah membuat "kantin kejujuran" di sekolah-sekolah.

"Pendidikan anti korupsi memang tidak semata-mata dengan memberikan pengetahuan atau teori tentang antikorupsi dan bahaya korupsi hanya di dalam kelas, tetapi sangat bagus jika dilakukan dengan praktik langsung," katanya.

Ia mengatakan, dengan "kantin kejujuran" siswa dilatih untuk bertanggung jawab dan taat aturan sehingga mereka dapat melatih diri untuk mengetahui mana yang bukan menjadi haknya dan mana yang menjadi kewajibannya.

"Kantin kejujuran memiliki berbagai peluang yang dapat dilakukan siswa, apakah mereka akan membayar sesuai dengan apa yang mereka ambil dan makan, atau mereka akan 'mencuri' dan lari dari tanggung jawab," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, memang saat ini belum dapat dilihat efektivitas "kantin kejujuran" maupun pendidikan antikorupsi, karena merupakan program jangka panjang.

"Waktu yang akan membuktikan apakah program ini mampu dan efektif untuk memutus mata rantai kejahatan korupsi. Masalah ini bukan sekedar pendidikan dan pengetahuan tentang baik dan buruk, tetapi juga menyangkut masalah moral dan perilaku," katanya.

Ia menyatakan sangat mendukung program pendidikan antikorupsi baik melalui sekolah antikorupsi maupun "kantin kejujuran" karena sedikit banyak akan membantu memberikan pengetahuan dan melatih perilaku siswa untuk berlaku jujur dan menentang korupsi.

"Apapun bentuknya pendidikan antikorupsi harus didukung, apalagi dilakukan sejak dini, karena akan lebih mudah mengarahkan dan mendidik kaum muda dari pada mendesak koruptor untuk bertobat," katanya. (Jurnal Nasional)

D. HANKAM :

1. Ancaman Terorisme TNI-Polri Akan Latihan Tiap Tahun

Untuk mengasah dan mempertajam kesiapsiagaan aparat TNI-Polri dalam menanggulangi kemungkinan ancaman aksi terorisme, simulasi anti teror direncanakan dilakukan setiap tahun. Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Abubakar Nataprawira di Jakarta, Minggu (21/12).

Latihan gabungan TNI-Polri dalam penanganan aksi terorisme ini adalah yang pertama kali. Apapun kekurangan-kekurangan yang ditemukan hari ini, kata Abubakar, akan dievaluasi untuk ke depan. "Karena kemungkinan latihan ini akan dilaksanakan setiap tahun," kata dia.

Dalam sehari ini, Minggu (21/12), personil gabungan TNI-Polri melakukan latihan penanggulangan dan kesiapsiagaan TNI-Polri dalam mengatasi ancaman terorisme. Di Jakarta, latihan berlangsung di lima lokasi antara lain, di Tanjung Priok, di lapangan terbang Halim, Gedung Bursa Efek Indonesia, The Sultan Hotel, dan Hotel Borobudur.

Selain itu juga dilaksanakan di beberapa daerah seperti di Jawa Timur di Hotel JW Mariot, Shangri-la dan Sheraton. kemudian di Bali di Hardrock Cafe, Hotel Continental. Hal serupa juga berlangsung di Kepulauan Riau, Selat Malaka. Untuk Jawa Tengah dan DIY di antaranya berlangsung di kantor telekomunikasi, Hotel Ciputra dan Hotel Jayakarta. (Media Indonesia)

E. HUKUM

1. Ketua BPK Prihatin Jajarannya Jarang Temukan Korupsi

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar prihatin karena hasil pemeriksaan BPK selama ini sangat jarang menemukan tindak pidana korupsi (TPK).

"Sangat disayangkan, karena ternyata hasil pemeriksaan saudara-saudara sangat jarang memuat temuan pemeriksaan yang mengandung unsur TPK," kata Anwar ketika menyampaikan pengarahan dalam rapat kerja pelaksana BPK 2008 di Kantor Pusat BPK Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, hal itu sangat disayangkan dalam kondisi di pemberitaan berbagai media massa dalam dan luar negeri menyatakan Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang paling korup di Benua Asia bahkan di dunia.

Sementara di dalam negeri, menurut dia, beberapa kasus yang sedang ditangani oleh apaarta penegak hukum saat ini, merupakan kasus yang sudah lama berlangsung.

"Tetapi mengapa selama ini tidak terungkap, hal seperti ini sungguh memprihatinkan bagi kita semua," katanya.

Lebih lanjut, ia mengharapkan agar penugasan pada pemeriksaan keuangan baik di pusat maupun daerah, khususnya mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundangan supaya dipertajam atau diberi perhatian yang lebih besar.

"Di samping itu, kepada para pemeriksa agar berupaya secara maksimal dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dalam menjawab tantangan tersebut," katanya.

Dalam kesempatan itu, anwar juga mengungkapkan bahwa Bank Dunia telah meminta kepada BPK untuk mengaudit bantuan lembaga keuangan itu kepada Indonesia dengan prioritas audit bantuan untuk pembangunan jalan.

Ia menyebutkan, selama itu audit itu dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kalau bantuan saja masih dikorupsi kapan kita jadi makmur, lihat jalan-jalan di Jawa Tengah, Sumatera, Sulawesi pada rusak parah, kalau begini kapan kita bisa bersaing dengan China," katanya. (Antara)

2. 4 Pasal UU MA Bermasalah

Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempersoalkan empat pasal dalam Undang-undang (UU) Mahkamah Agung (MA) yang sudah disahkan DPR.

Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho, empat pasal permasalahan itu antara lain usia hakim agung, kewenangan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dihapuskannya ketentuan hakim ad hoc, dan pelemahan kewenangan Komisi Yudisial (KY).

Emerson menjelaskan, untuk permasalahan pertama terkait pensiun hakim agung menjadi 70 tahun, dinilai tidak berdasar. Poin ini dinilai melanggar ketentuan dan bisa menciptakan ketidakpastian hukum baru. Dia mempertanyakan apakah ketentuan ini berlaku bagi

hakim agung yang telah diperpanjang masa pensiunnya karena sudah berusia 65 tahun, atau juga berlaku untuk hakim agung yang telah berusia di atas 65 tahun.

Pasalnya, UU No 5/2004 tentang MA membatasi usia pensiun hanya 65 tahun. "Perpanjangan dari 65 menjadi 67 pun seharusnya hanya dapat dilakukan presiden, karena UU saat itu menyatakan pengangkatan dan pemberhentian hakim agung dilakukan presiden," tegas Emerson di Jakarta kemarin.

Kemudian, persoalan kedua adalah dalam Pasal 81 (a) UU MA yang mengatur kewenangan audit BPK hanya meliputi biaya kepaniteraan yang dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sedangkan biaya proses perkara perdata tidak dikategorikan PNBP. Hal ini, menurut Emerson, merupakan celah dan perangkap hukum yang sangat lihai karena sepintas akan dipahami, biaya perkara masuk kategori PNBP dan dapat diaudit BPK.

"Padahal tidak. Jelas, DPR sedang melegitimasi rezim tertutupan dan antitransparansi di MA," katanya. Permasalahan ketiga terkait dihapuskannya ketentuan mengenai hakim ad hoc di MA. Hal ini dinilai secara tidak langsung telah menghapus keberadaan hakim ad hoc di MA, sehingga dapat menjadi cacat hukum setelah berlakunya UU MA yang baru ini. Alasan DPR bahwa hakim ad hoc sudah diatur dalam UU tersendiri, menurut Emerson tidak bisa menjadi alasan.

"Kekhawatiran publik tentang upaya DPR untuk menggerogoti Pengadilan Tipikor dan pemberantasan korupsi, terbukti dalam UU ini," tandasnya. Terakhir, UU MA ini juga dinilai melemahkan Komisi Yudisial (KY) dengan segala kewenangan yang dimiliki. UU MA, ujar dia, hanya menempatkan KY sebagai pengawasan lain, di luar pengawasan utama di tangan MA.

Padahal, keberadaan KY yang diinginkan konstitusi memiliki peran yang kuat dalam pengawasan hakim. Karena itu, tiga lembaga masyarakat yakni Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Reformasi Hukum Nasional (KRHN), dan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (UGM) sedang menyiapkan materi pengujian yang rencananya diajukan pada Januari 2009.

"Pengujian secara formal dan materiil akan kita lakukan. Tapi apakah diajukan secara bersamaan atau terpisah, masih dikaji lagi," tandas Emerson. Jika dikabulkan, pengujian formal bisa membatalkan keseluruhan isi UU MA yang disahkan, Kamis (18/12) lalu. Sementara itu, pengujian materiil hanya terkait sejumlah pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi untuk diminta dibatalkan.

Peneliti hukum ICW Febri Diansyah menegaskan, pihaknya hingga saat ini tidak bisa menerima keabsahan revisi UU MA menggantikan UU No 5/2004 tentang MA. Dari segi pembentukan, ICW menilai UU MA memiliki beberapa cacat, seperti diabaikannya partisipasi publik, minimnya transparansi dan pembahasan, serta pengesahan yang tergesagesa.

Secara formal, pengabaian pimpinan DPR atas keberatan Fraksi PDIP untuk mengesahkan UU MA dinilai telah melanggar prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan tugas legislasi DPR. Ketua Divisi Peradilan KRHN Ratnaningsih Dasa Hastarini menambahkan, sebelum mengajukan pengujian UU MA, pihaknya akan terlebih dulu melakukan kajian dengan sejumlah lembaga.

Dengan begitu, pengajuan uji materiil maupun formal kemungkinan dilakukan bersama oleh koalisi lembaga yang menentang pengesahan UU ini. (Koran Sindo)

3. UU BHP Orang Miskin Dihambat Jadi Pintar

Keberadaan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) di satu sisi akan meningkatkan kualitas pendidikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Namun, di sisi lain, UU ini juga akan membuat orang miskin tidak mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

"Saya memprediksikan biaya pendidikan semakin mahal, sehingga hanya warga yang memiliki dana saja yang bisa menempuh pendidikan tinggi. Secara kuantitas, jumlah peserta pendidikan akan berkurang, karena orang miskin dipastikan tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi," kata Prof Dr Zainuddin Maliki, Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur kepada SH, Sabtu (20/12)

Menurutnya, pendidikan di Indonesia akan menganut pasar bebas. Perguruan tinggi akan bersaing meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan, tetapi mereka melakukan penarikan dana yang besar pada peserta pendidikan di lembaga tersebut. "Sudah lama pasar

bebas pendidikan berlangsung di Indonesia. Dengan adanya UU BHP, pasar bebas itu akan makin kentara,” kata Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu

Jadi, lanjutnya, pendidikan akan menganut pasar bebas. Siapa cepat dia dapat, siapa bagus akan dicari. Barang bagus akan mahal, dan yang tidak bisa membayar, mereka tidak dapat mengikuti pendidikan. Itu sama saja dengan orang miskin dilarang pintar, karena mereka pasti tidak mampu membayar

Zainuddin mengusulkan agar pemerintah turut memfasilitasi perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri untuk melakukan sinergi dengan berbagai perusahaan atau korporat. Dengan demikian, biaya pendidikan akan bisa ditekan, meski tidak terlalu besar.

Di bagian lain, pakar pendidikan Suwignyo Rahman di Semarang, Jumat (19/12), mengatakan UU BHP yang di sahkan DPR RI pada 17 Desember 2008 bernuansa komoditas dan melenceng dari peraturan perundang-undangan yang telah ada. ”Nuansa komoditas kental dalam UU BHP, sehingga tidak ada jalan lain kecuali melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK-red),” katanya.

Suwignyo mengatakan, terbentuknya UU BHP memang merupakan penjabaran dari Pasal 53 Ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyebutkan semua penyelenggara pendidikan dan atau satuan pendidikan formal, baik yang didirikan pemerintah maupun masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan.

Namun persoalannya, lanjut Suwignyo, UU BHP melenceng jauh karena juga mengatur masalah alokasi anggaran yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. PP mengatur partisipasi masyarakat dalam pendidikan bersifat sukarela dan tidak mengikat.

Kepentingan Golongan

Suwignyo mengaku, pembentukan UU BHP tidak terlepas dari kepentingan politik satu kelompok atau golongan dan kurang berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain melakukan uji materi ke MK.

Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi Depdiknas Johannes Gunawan mengatakan, yayasan yang sesuai undang-undang tidak perlu khawatir dengan diberlakukannya UU BHP ini. Menurut Johannes, karena UU BHP menghendaki transparansi dan akuntabilitas dari yayasan pendiri perguruan tinggi. Di sisi lain Johannes mengakui saat ini masih banyak yayasan yang orientasinya hanya untuk kepentingan mencari profit untuk kepentingan orang tertentu.

”Ide dasar BHP adalah setelah mendirikan yayasan, kekayaan yayasan bukan lagi milik perorangan. Jadi harta yayasan dan pemilik yayasan dipisahkan. Harta yayasan itulah yang digunakan untuk kepentingan kegiatan sosial, agama, dan kemanusiaan, seperti tertuang dalam undang-undang yayasan yang baru,” jelasnya.

Namun, Johannes mengutarakan hampir sebagian besar yayasan yang mendirikan perguruan tinggi berorientasi pada keuntungan. Tidak heran, lanjut Johannes, jika dengan diberlakukannya UU BHP, yayasan yang seperti itu merasa terancam keberadaannya.

Uji Materi

Menanggapi banyaknya penolakan terhadap UU BHP, Wakil Ketua Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Irsyad Sudiro mempersilakan mahasiswa mengajukan uji materi atas UU BHP tersebut. Penolakan mahasiswa menurutnya karena kurang pemahaman terhadap substansi undang-undang tersebut.

Kepada SH, di Jakarta Sabtu (20/12), Irsyad menyatakan, cara paling baik membuktikan bermanfaatnya undang-undang ini adalah melalui uji materi di MK. ”Di situ nanti akan terbukti baik buruknya undang-undang ini,” ujarnya.

Dia mengatakan jika memang ada argumen-argumen lain yang menyatakan UU BHP jelek, bisa diajukan di MK. Tetapi kata Irsyad, DPR berpandangan undang-undang ini justru telah menampung aspirasi aspirasi untuk memajukan dunia pendidikan.

”Keberatan-keberatan dari sejumlah kalangan, mungkin hanya kurang sosialisasi saja,” ujarnya. Politisi Fraksi Partai Golongan Karya ini berpendapat apa yang dikeluhkan mahasiswa soal ancaman liberalisasi dan komersialisasi pendidikan tidak benar. Substansi RUU BHP, kata Irsyad justru memberi perlindungan dan mencegah adanya liberalisasi pendidikan.

UU BHP, katanya, mengatur penyelenggaraan pendidikan sehingga lebih demokratis. Sebagai wacana, penolakan-penolakan tersebut sah-sah saja. Namun dia mengatakan dalam

pembahasannya RUU ini sudah melalui prosedur dan tata cara pembuatan undang-undang yang benar. Aspirasi pihak perguruan tinggi juga sudah ditampung melalui rapat-rapat yang diikuti Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. "RUU ini sudah melalui pertimbangan yang matang dan prosedur yang benar," ujarnya. (Sinar Harapan)

4. Korupsi Sisminbankum Tersangka Baru Segera Diumumkan

Kejaksaan Agung (Kejagung) membidik tersangka baru kasus dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkum dan HAM yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 400 miliar.

"Dalam waktu dekat akan kita tetapkan tersangka baru lagi, mungkin dari PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) atau Depkum dan HAM," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Marwan Effendy, di Jakarta, Jumat.

Dikatakan, penetapan tersangka baru itu ada yang berasal dari laporan Direktur Utama (Dirut) PT SRD, Yohannes Woworuntu, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Atau dari keterangan lain-lainnya," katanya.

Ia mengatakan, pengungkapan kasus dugaan korupsi Sisminbakum tersebut, kemungkinan berlangsung panjang dan dilakukan secara bertahap-tahap. "Mungkin sampai 2009," katanya.

Dalam kasus Sisminbakum, Kejagung sudah menetapkan empat tersangka, yakni Zulkarnain Yunus dan Romli Atmasasmita (mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU)), serta Syamsuddin Manan Sinaga (Dirjen AHU) dan Yohannes Woworuntu (Dirut PT SRD).

Dalam pengakuannya Yohannes Woworuntu mengatakan bahwa dia telah dipaksa Harry Tanoesudibyo dan Hartono Tanoesudibyo selaku Komisaris PT SRD, untuk menandatangani surat yang menyebutkan dirinya sebagai pemegang saham PT SRD.

Kejagung juga telah memeriksa kembali Bambang Rudianto Tanoesudibyo, Komisaris PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD), terkait dugaan korupsi Sisminbakum.

"Ya benar, Bambang Rudianto diperiksa, sebagai pemilik saham untuk tersangka Yohannes Woworuntu," kata JAM Pidsus Marwan Effendy seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Bambang Rudianto Tanoesudibyo pernah diperiksa Kejagung untuk tiga tersangka kasus Sisminbakum, yakni, Zulkarnain Yunus dan Romli Atmasasmita, dan Syamsuddin Manan Sinaga (Dirjen AHU).

Kasus dugaan korupsi Sisminbakum bermula tahun 2001 ketika Sisminbakum diberlakukan di Ditjen AHU, untuk mengatur layanan pemesanan nama perusahaan, pendirian dan perubahan badan hukum dan lain sebagainya.

Informasi layanan dapat diakses melalui website www.sisminbakum.com. dan ditetapkan terdapat biaya akses fee dan biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelayanan jasa pemerintah berupa pemesanan nama perusahaan, pendirian dan perubahan badan hukum dan sebagainya.

Namun biaya akses fee itu tidak masuk ke rekening kas negara melainkan masuk ke rekening PT SRD dan dana tersebut dimanfaatkan oleh oknum pejabat.

Permohonan layanan melalui Sisminbakum yang dilakukan notaris seluruh Indonesia, setiap hari kurang lebih 200 permohonan dengan biaya minimal Rp 1.350.000 sehingga pemasukan dari biaya jasa tersebut sebelum 2007 di bawah setiap bulan sekitar Rp 5 miliar dan setelah 2007 sekitar Rp 9 miliar.

Total biaya yang diperlukan tiap notaris untuk pengesahan sebuah perseroan mencapai Rp 1.685.000, Rp 200 ribu untuk PNBP, Rp 350 ribu (PPN 10 persen) tarif akses pemesanan nama persero, dan Rp 1 juta (PPN 10 persen) tarif akses pendirian perseroan. (Suara Karya)

F. OLAH RAGA : Tidak Ada

1. Tim Karate Indonesia Sabet Enam Emas di Malaysia

Tim karate Indonesia mengumpulkan enam medali emas dan empat perunggu dalam kejuaraan Asian Karate Organisation Internasional (KOI) di Malaysia, Minggu (21/12).

Tambahan medali emas di hari terakhir disumbangkan melalui, Jimtar Simanjutak dan Rafael Rizky di nomor kumite, ujar pelatih nasional, Donny Zaiko yang mendampingi atlet Karate selama di Malaysia. "Pada pertandingan terakhir Jimtar dan Rafael tampil optimal di kejuaraan

KOI, meski sebelumnya baru turun di POM ASEAN. Hal itu membuktikan atlet muda mempunyai semangat juang yang tinggi untuk menyuguhkan prestasi puncaknya," katanya.

Donny melanjutkan, prestasi yang diukir tim karate kali ini cukup lumayan. Pasalnya, tanpa persiapan khusus di Pelatnas, mereka masih mampu meraih sukses cemerlang dengan medulang 6 medali emas, dan 4 perunggu. Sedang beberapa hari sebelumnya mereka juga menyuguhkan 3 medali emas, 7 perak dan 7 perunggu di POM ASEAN. Hal itu menunjukkan kemajuan pesat menjelang penutupan akhir tahun 2008. Untuk itu ia berharap, ditahun mendatang prestasi yang sudah bagus dapat ditingkatkan lagi.

Dengan harapan, saat diturunkan di SEA Games XXV Laos tahun 2009 tim merah-putih mampu meraih sukses dengan menyabet juara umum seperti di Filipina dengan menyuguhkan 5 medali emas bagi kontingen Indonesia. Harapan itu sangat didambakan oleh masyarakat di tanah air. Pasalnya, saat tampil di SEA Games XXIV di Thailand tahun 2007 lalu tim karate hanya mengumpulkan 2 medali emas.

Hal itu tentunya menjadi cambuk bagi perkembangan atlet karate yang ada saat ini dalam mempersiapkan prestasinya menuju multi event ASEAN di Laos. Untuk mewujudkan semua itu, maka harus ditempuh dengan persiapan optimal sedini mungkin. Untuk itu PB Forki terus menggembleng atletnya di berbagai event internasional, meski Pelatnas SEA Games belum dimulai. (Media Indonesia)

G. LINGKUNGAN HIDUP :

1. Perempuan Korban Utama Perubahan Iklim

Peran serta perempuan Indonesia dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan masih kurang bila dibandingkan dengan negara berkembang ASEAN lainnya dan mereka sering menjadi korban utama kerusakan lingkungan.

"Korban terbesarnya dari berbagai bencana itu adalah perempuan dan anak-anak," kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono usai mengunjungi wilayah binaan Pemberdayaan Perempuan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (20/12).

Menurut Meutia Hatta, dampak pemanasan global dan perubahan iklim adalah terjadinya banjir, longsor, angin puting beliung, gempa dan naiknya permukaan laut. Kerusakan dan pencemaran lingkungan pasti akan berakibat pada timbulnya gangguan kesehatan dan kemiskinan.

Meutia Hatta menjelaskan potensi perempuan sampai saat ini belum dapat diberdayakan untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan bersih, karena kurangnya dukungan pengetahuan tentang tata cara pengelolaan lingkungan.

"Disayangkan seolah-olah perempuan tidak ikut bertanggung jawab atas lingkungannya, jarang diikutsertakan dalam pengelolaan limbah dan pencegahan pencemaran lingkungan dari pemakaian bahan-bahan konsumsi rumah tangga," keluhnya.

Padahal tambahnya, sesuai UU Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 6 menyebutkan perempuan juga berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah serta menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan.

Meutia mengajak seluruh kaum perempuan agar mulai memberdayakan diri dalam mencegah pemanasan global.

"Caranya dengan menanam pekarangan dengan jenis tanaman pelindung atau tanaman obat atau tanaman lain yang bermanfaat. Atau dengan cara lain dengan pola konsumsi hijau atau pemilihan produk rumah tangga yang berwawasan lingkungan dan pengelolaan sampah," ujarnya.

Ia menambahkan, peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi agenda bangsa secara menyeluruh dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia dunia. (Jurnal Nasional)

III. ARTIKEL :

1. Melanggengkan Semangat Hari Ibu oleh Rina Fahmi Idris

Pada 1928, tepatnya tanggal 22–25 Desember, sekumpulan perempuan berkumpul di Yogyakarta untuk memikirkan kaum perempuan bangsa saat itu.

Bahkan para wanita saat itu tidak hanya memimpikan satu tatanan sosial-politik yang memberikan kemerdekaan kepada kaumnya, tetapi juga memperjuangkan tegaknya bangsa Indonesia yang satu dalam kesejahteraan yang lepas dari tirani penjajahan.

Di dalam semangat mereka mengalir darah pejuang-pejuang wanita seperti Cut Nyak Dien, RA Karini, Rangkayo Rasuna Said, Cut Meutia. Atas dasar itulah momen tersebut kemudian dijadikan sebagai Hari Ibu nasional untuk melanggengkan spirit yang tertanam di dada mereka.

Kini 80 tahun sudah berlalu, sudah barang tentu semangat yang telah diletakkan oleh mereka itu harus terus dipupuk sampai kesejahteraan perempuan dan bangsa benar-benar terwujud nyata di Tanah Air kita. Tidak hanya perempuan, seluruh komponen bangsa juga secara moral mesti melanggengkan spirit tersebut.

Semangat luhur yang juga menjadi cikal bakal lahirnya organisasi organisasi wanita yang sekarang ada masih relevan untuk dilanggengkan di tengah krisis ekonomi global yang berimbas secara langsung bagi sendi ekonomi negara kita.

Selain itu, menghayati dan mengembalikan roh perjuangan perempuan juga sangat penting, apalagi struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya kita masih menempatkan kaum perempuan sebagai kelompok yang terpinggirkan. Padahal, bersatunya kaum perempuan 80 tahun lalu digerakkan oleh semangat untuk memerdekakan bangsanya tanpa membedakan ras, suku, dan jenis kelamin.

Kemerdekaan secara prosedural memang sudah didengungkan pada 17 Agustus 1945 lalu. Tatanan kebangsaan selama itu juga terus terangkai. Akan tetapi, perjuangan kaum perempuan untuk menjemput kemerdekaan bagi kaumnya belum terwujud secara nyata. Setiap hari kita menyaksikan di pinggir-pinggir trotoar banyak ibu-ibu dengan anak balitanya duduk menengadahkan berharap belas kasih. Mereka seolah mewakili puluhan juta kaum perempuan yang mengharapakan kemerdekaan bagi seluruh kaumnya

Sikap terpinggirkan yang dialami kaum perempuan seolah tidak pernah usai. Jika dahulu mereka berjuang untuk mencari kemerdekaan guna mendobrak tirani kaum penjajah, kini justru mereka masih harus bergelut untuk melawan sistem sosial, politik, dan budaya bangsanya sendiri yang belum sepenuhnya memberikan ruang kemajuan bagi kaumnya. Oleh karena itu, tanpa bermaksud mengeliminasi hasil perjuangan yang sudah dirintis, perjuangan kaum perempuan terus berlanjut.

Dalam beberapa sektor perempuan belum mendapatkan kemerdekaan, padahal kaum perempuan memiliki potensi untuk mengantarkan kesejahteraan dan kemajuan bangsanya. Perempuan masih bergelut dengan beragam persoalan, baik kekerasan, kebodohan maupun kemiskinan.

Dalam masalah kekerasan misalnya, menarik melihat data yang dikeluarkan oleh Women Crisis Centre yang menjelaskan bahwa tahun lalu kekerasan yang dialami oleh perempuan masih cukup tinggi sekitar 87,32% dari 284 kasus yang diteliti. Prevalensi kekerasan ini tidak jauh berbeda dengan tingkat akses pendidikan yang diperoleh perempuan.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak perempuannya pun masih rendah. Anak perempuan usia 15 yang buta aksara 11,61%, dua kali lipat dari persentase anak laki-laki (5,44%). Selain problem di atas, masalah kesejahteraan juga masih mendera kaum perempuan. Kemiskinan dan perempuan seolah menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.

Akses perempuan terhadap ekonomi belum berbanding lurus dengan tingkat keadilan yang diperoleh perempuansaatini. Keselaraskan kaum perempuan dengan kemiskinan mengindikasikan peran strategis perempuan belum dapat dioptimalkan sebagai bagian dari kelompok identitas yang strategis untuk memajukan ekonomi.

Hambatan yang dialami perempuan dewasa ini tidak semata dikarenakan masih terpinggirkannya kaum perempuan pada ranah kultural, tetapi juga karena desain struktur yang kurang mendukung. Hal ini menandakan bahwa kesadaran akan pentingnya menopang kesejahteraan ekonomi perempuan sebagai bagian dari upaya menyejahterakan bangsa belum berintegrasi dalam mental struktur kebijakan.

Artinya, perjuangan perempuan kontemporer masih bergelut untuk memerdekakan dirinya dari jejaring struktur budaya, sosial, dan politik yang masih terkatup. Oleh karena itu, hal utama yang mesti dirumuskan saat ini adalah mendesain kemajuan dan kesejahteraan yang berbasis pada perempuan. Upaya ini perlu diwujudkan nyata ke ranah praktis.

Sudah barang tentu, upaya tersebut tidak akan datang begitu saja tanpa ditopang oleh usaha yang keras dari kaum perempuan sendiri. Semangat yang ditunjukkan oleh kaum wanita terdahulu menjadi bukti kemerdekaan perempuan hanya akan diperoleh melalui usaha dan perjuangan kaum perempuan sendiri.

Dengan demikian perlu mendesain strategi untuk memperkuat jaringan dan gerakan antarorganisasi perempuan yang ada di Indonesia. Upaya penguatan jaringan dan gerakan ini kiranya tidak untuk membangun dikotomisasi laki-laki dan perempuan, tetapi memproyeksikan kerja untuk memperkuat peran ekonomi perempuan dalam membangun kesejahteraan bangsa.

Apa yang dilakukan oleh para pejuang wanita pada masa penjajahan seperti Cut Nyak Dien, RA Kartini adalah berbuat untuk memberikan kemerdekaan bagi anak bangsanya. Krisis ekonomi global yang membawa dampak bagi perekonomian Indonesia dapat dijadikan sebagai momentum memperhatikan peran strategis perempuan dalam ekonomi.

Kreasi pembangunan ekonomi kiranya dapat diproyeksikan dengan tetap memperhatikan perempuan. Beberapa pengamat menilai bahwa abad ke-21 merupakan abad yang ramah terhadap perkembangan ekonomi. Di banyak negara, kesadaran tersebut mulai terbangun. Keadaan bangsa yang berada dalam cengkeraman krisis multidimensi kiranya menyiratkan bahwa tantangan yang dihadapi bangsa tidak jauh berbeda dengan kondisi perjuangan kaum wanita terdahulu.

Semangat dan potensi perempuan dapat memberikan sumbangsih besar untuk membangun bangsa ini. Sudah barang tentu, upaya tersebut akan dapat direalisasikan jika semangat dan nilai-nilai yang terkandung di dalam hari ibu nasional saat ini direngkuh dan dilanggengkan ke dalam gerakan nyata yang tidak hanya sebatas seremonial. (Koran Sindo)

2. TNI: 2008, Tahun Penyempurnaan Reformasi Internal oleh M Senoatmodjo

Tahun 2008 genap sepuluh tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan reformasi internal. Banyak sudah langkah-langkah yang ditempuh TNI untuk memenuhi tuntutan perubahan sesuai aspirasi masyarakat yang gencar menghendaki reformasi dalam segala bidang.

Reformasi internal TNI yang dimulai sejak 1998, sebagai paradigma baru yang merupakan rujukan bagi setiap tindakan TNI, selanjutnya dimanifestasikan dalam program reformasi internal TNI.

Esensi yang tercantum dalam reformasi TNI, antara lain pertama, secara bertahap meninggalkan peran sosial politik (sospol); kedua, memusatkan perhatian kepada tugas pokok pertahanan nasional; ketiga, menyerahkan fungsi dan tanggung jawab keamanan dalam negeri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; meningkatkan konsistensi implementasi doktrin gabungan, dan kelima meningkatkan kinerja manajemen internal.

Langkah-langkah reformasi TNI yang telah dilaksanakan, antara lain perumusan paradigma baru TNI, pemisahan Polri dari TNI. Di bidang politik, secara bertahap, meninggalkan peran sosial politik, tidak terlibat dalam kegiatan partisan. Mengakhiri doktrin kekaryaan sehingga tidak ada lagi prajurit aktif yang menduduki jabatan di luar dinas TNI.

Kemudian, melakukan likuidasi institusi sosial politik dalam struktur TNI. Dan yang lebih penting dan menjadi tuntutan masyarakat, yaitu netralitas TNI dalam pemilihan umum (pemilu).

Masalah peranan sosial politik TNI, hal ini telah dilaksanakan secara bertahap dan puncaknya ketika TNI/Polri meninggalkan kursi DPR setelah Pemilu 2004. Demikian pula dalam kekaryaan, tidak ada lagi anggota/prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan fungsional kepala daerah. Ketentuan yang berlaku saat ini sesuai dengan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000, bahwa TNI/Polri diwakili di MPR selambat-lambatnya hingga tahun 2009.

Dengan dilaksanakan reformasi internal TNI yang kini sudah berlangsung selama 10 tahun dan TNI telah pisah dari Polri, TNI lebih memfokuskan diri pada doktrinya yang sejak tahun lalu telah berubah menjadi "Tri Dharma Eka Karma". Doktrin TNI sebelumnya adalah "Catur Dharma Eka Karma".

Dengan doktrin baru itu, maka peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sedangkan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI, tugas pokok TNI dilaksanakan melalui operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer untuk merang, meliputi operasi gabungan TNI, operasi darat, operasi laut, operasi udara, kampanye militer dan operasi bantuan.

Anggaran Minim

Dalam melaksanakan operasi militer untuk perang, TNI banyak mengalami kendala mengingat terbatasnya anggaran dari pemerintah. Bahkan, dalam tahun-tahun terakhir ini, anggaran TNI yang sangat kecil masih dipotong 10 persen akibat krisis ekonomi global dunia. Akibatnya beberapa program yang telah direncanakan, terpaksa ada yang dibatalkan atau dikurangi persinya.

Anggaran yang kecil untuk TNI dan kemudian dipotong 10 persen mengakibatkan pengadaan alutsista (alat utama sistem kesenjataan) tersendat-sendat. Alutsista yang dimiliki Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, kondisinya sudah SOS. Karena alutsista ketiga angkatan tersebut umumnya sudah berusia puluhan tahun.

Misalnya, TNI Angkatan Laut, menurut laporan terakhir sekitar 70 persen kapalnya sudah uzur. Bahkan beberapa diantara ada yang berusia di atas 50 tahun. Hanya karena keahlian para teknisinya yang bisa memperpanjang usia alutsista tersebut.

Meskipun anggaran terbatas, dengan mengutamakan sistem prioritas, dalam tahun 2008 ini ketiga angkatan itu mampu membeli sejumlah alutsista baru. Misalnya Angkatan Darat telah memesan 50 unit Panser 6x6 dari PT Pindad. Kemudian TNI Angkatan Udara yang memesan enam unit pesawat tempur Sukhoi dari Rusia, diharapkan dalam beberapa hari ini akan tiba di Indonesia untuk menggenapi empat Sukhoi yang telah ada. Sedangkan TNI Angkatan Laut, secara perlahan juga membenahi alutsistanya yang sebagian besar sudah berusia tua, antara lain dengan membeli tiga kapal jenis Sigma. Terakhir kapal yang diberi nama KRI Iskandar Muda yang telah diresmikan bertepatan dengan peringatan Hari Armada di Surabaya beberapa hari yang lalu.

Kemudian operasi militer selain perang, antara lain mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital dan melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

Khusus dalam mengatasi terorisme, sejak tanggal 18 Desember hingga hari ini (Senin, 22 Desember 2008), TNI dan Polri melaksanakan latihan bersama, baik di darat, laut dan udara. Latihan bersama itu dilakukan di lapangan maupun di dalam gedung/hotel.

Bisnis TNI

Kini yang dirasakan masih menjadi ganjalan TNI dalam menjalankan kiprahnya adalah masalah penghapusan bisnis TNI yang dicetuskan pihak DPR sejak 2006. Bagi TNI, penghapusan TNI sebenarnya tidak menjadi masalah, asalkan ada kompensasinya dari pemerintah. Sebab, bisnis yang dijalankan oleh TNI pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.

Penghapusan bisnis TNI yang dijadwal harus tuntas tahun 2009, pada hakekatnya sudah mendekati final. Karena pemerintah sudah membetuk Tim Nasional Pengalihan Bisnis TNI yang sejak beberapa waktu yang lalu sudah merampungkan tugasnya.

Tim tersebut sudah mengeluarkan tiga rekomendasi untuk penghapusan bisnis TNI. Pertama, pengalihan aktivitas bisnis TNI dilakukan dengan penataan dan reposisi serta pelurusan atas yayasan dan untuk koperasi perlu ditata dan diluruskan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, peran primkop digantikan oleh satuan kerja yang dibentuk di bawah Dephan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola dan memenuhi kebutuhan pokok prajurit. Ketiga, melaksanakan reposisi dan penataan dengan cara penggabungan yayasan TNI dengan yayasan sejenis dibawah Dephan dan koperasi TNI dengan koperasi dibawah Dephan sesuai ketentuang yang berlaku.

Pada dasarnya upaya penghapusan bisnis TNI yang telah berlangsung sekitar dua tahun sudah selesai. Kini tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Yang jelas, penghapusan bisnis TNI tidak berpengaruh bagi para prajurit. Seperti dikatakan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Christian Zebua, penghapusan bisnis TNI itu tidak berpengaruh kepada kehidupan prajurit dan juga tidak berpengaruh terhadap pengadaan alutsista. Karena

pengadaan alutsista TNI kini sebagian besar sudah bisa dipenuhi dengan produksi dalam negeri. (Suara Karya)

3. Wajah MUI dan Fatwa Rokok oleh M Luqman Hakim MA

Dunia rokok, tiba-tiba mengepulkan kehangatan asap dan apinya, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam waktu dekat berencana mengeluarkan fatwa merokok, menyusul sebuah surat dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) 11 September 2008 yang ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang dukungan agar keluarnya fatwa MUI tentang rokok adalah haram, turut memicu pro dan kontra mengenai aktivitas konsumsi merokok akhir-akhir ini.

Jika fatwa MUI jadi diturunkan, dan indikasi ke arah fatwa preventif, seperti haram dan makruh, maka industri tembakau dari hulu (usaha tani) sampai hilir yang telah menyerap tenaga terlibat langsung sebanyak 6.100.000 orang (tanaman tembakau dan proses lapangan, cengkih, industri terkait sampai distribusi) akan kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian.

Padahal jika masing-masing menghidupi empat orang saja, ada 30.500.000 orang yang hidupnya bergantung pada industri tersebut. Tentu itu bisa memicu sebuah ledakan pengangguran yang cukup mengerikan di tengah-tengah krisis dewasa ini. Belum lagi pengaruh interaksi sosial, yang terbangun secara instrumental melalui adat istiadat merokok.

Bahwa tradisi merokok kemudian diatur melalui tata tertib dan aturan merokok, adalah bagian dari dinamika sosial itu sendiri. Namun, mematikan seluruh elemen industri rokok dari hulu hingga hilir bisa menimbulkan kekacauan social. Maka itu, sejumlah ulama dan kiai di Jawa Timur bermusyawarah untuk menentukan hukum yang tegas mengenai rokok ini, bukan didasari alasan karena mayoritas para kiai juga perokok. Tetapi dalam Alquran maupun hadis Nabi, istilah rokok dan aktivitas merokok tidak pernah disebutkan melalui teks (nash) yang tegas (shorih). Persoalan haram dan halalnya rokok ini, ternyata tidak sederhana.

Data yang tersebar mengenai akibat negatif merokok dieksploitasi secara ekstrem. Ditambah, kampanye yang bombastis muncul dengan jargon-jargon berbau agama juga disebar, seperti: "Tak ada satu pun nabi yang merokok! Tuhan tidak suka bau rokok! Tembakau itu kawan setan. Bagaimana tidak diharamkan, setiap hari Anda mengisap api neraka (api di batang rokok)?"

Sebuah kampanye yang doktrinal tentu saja tidak mendidik dalam pencarian keseimbangan hidup antara kesehatan dan aktivitas ekonomi. Kenapa demikian? Karena informasi akurat tentang bahaya merokok dengan segala dampak yang ditimbulkannya, selama ini hanya mengacu pada hasil survei formal, tanpa pernah ada pembuktian nyata secara fisik atas tragedi negatif pada tubuh manusia akibat merokok.

Sejauh mana akurasi WHO dan Depkes dalam soal nikotin dan perilaku konsumsi manusia seluruh dunia, tidak bisa disimpulkan secara gradual begitu saja. Sebagaimana yang tertulis di setiap bungkus rokok: "Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin," bukanlah sebuah aksioma yang eksak, primer, dan fundamental, melainkan lebih merupakan indikator-indikator yang instrumental belaka, yang tentu saja sangat kasuistik dan relatif. Publik hanya percaya begitu saja, karena mayoritas publik sangat awam terhadap dunia kesehatan, apalagi secara detail yang berhubungan dengan medis.

Fatwa MUI

KNPA barangkali tidak sendiri dalam menggalang masyarakat dalam anti-rokok. Dan keinginan MUI hendak mengeluarkan fatwanya, juga dilandasi protes dan usul masyarakat.

Namun, MUI haruslah sangat hati-hati, karena citra MUI dalam soal fatwa selalu menimbulkan pro-kontra selama ini, bukan saja karena cara pengambilan putusannya yang insidental, menunggu usulan dan protes, juga disebabkan citra MUI yang selama ini berbau politis sejak lembaga ini didirikan di era Orba.

Dalam sejarah keulamaan di bidang fatwa, justru tidak dijumpai sebuah lembaga mirip MUI yang harus berfatwa didasari atau menunggu protes dan usulan publik. Para ulama Islam senantiasa berfatwa, apakah secara kolektif maupun individual, atas masalah yang berkembang, apakah karena muncul melalui protes publik atau tidak.

Karena jika ada masalah yang seharusnya diharamkan, tetapi publik tidak protes, dan para ulama diam, berarti para ulama itulah yang turut menanggung dosa. Lebih berdosa lagi ketika para ulama mengharamkan, hanya didasari karena sudah diprotes masyarakat atas

keharamannya, atau mengharamkan karena ia memang benci bau dan asap rokok, atau tidak merokok.

Memfatwakan konsumsi rokok harus dilihat secara total, simbiosis, dan ekologis, tentu juga ekonomis dan tidak kalah pentingnya hubungan sosial (silaturahmi) yang efektif di balik dunia rokok. Sebagaimana orang bicara tentang kesehatan, seluruh faktor yang menegakkan kesehatan manusia, regenerasi, eksistensi, dan resistensinya harus dimunculkan secara transparan.

Data di atas kertas sama sekali tidak menjamin sebuah database bagi pengambilan putusan istimbath dalam kasus rokok ini. Menurut para ulama fikih, proses pengeluaran fatwa haruslah didasarkan pada latar belakang masalah yang memerlukan penelitian lebih detail, dan menyelaraskan dengan teks Alquran dan Sunah, konsensus sahabat Nabi (ijma') serta analogi hukum (qiyas), tidak dengan metode yang formal dan aksioma sebab akibat ('illat al hukmi) belaka.

Namun, harus melihat tujuan utama dari syariat (maqashidusy-syari'ah) yang lebih universal. Pertimbangan demikian juga tidak cukup, mesti melihat kasus-kasus khusus (khas) dan umum ('aam) yang tersirat maupun tersirat dari sumber hukum utama fikih. Misalnya yang berhubungan dengan kaidah-kaidah fikih yang sudah disepakati para ulama, seperti yang tercantum dalam lima prinsip kaidah.

Pertama, segala perkara tergantung tujuannya. Kedua, segala sesuatu secara prinsip diperbolehkan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Ketiga, adat istiadat itu menjadi hukum legal, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Keempat, tidak bahaya dan tidak membahayakan.

Kelima, maslahat umum (mashalihul mursalah). Walaupun fatwa MUI kelak tidak mengikat dan tidak bisa dijadikan sumber hukum bagi proses peradilan di negeri ini, umat sering menjadi bingung karena pro-kontra yang tidak kondusif, menyusul fatwa-fatwa MUI lainnya. Akan lebih transparan jika MUI, dalam semua fatwanya, memberikan pilihan-pilihan mendidik dengan mengeluarkan lima hukum atau bisa lebih, atas setiap kasus fikih.

Kalau dalam konteks rokok, misalnya dihukumi haram, jika dia merokok menyebabkan kematian dan penyakit yang mematikan. Dihukumi halal, bila merokok menjadi penyeimbang kesehatan dalam tubuh, mencerdaskan, mendukung relaksasi syaraf dan psikologi dengan kadar tertentu. Dihukumi makruh, manakala merokok dilakukan dengan dosis secara berlebihan.

Dihukumi sunat jika merokok bisa menetralkan sejumlah penyakit dalam tubuhnya, atau menjadi akselerator tertentu bagi penyembuhan. (Semisal untuk kepentingan medis, seperti obat yang mengandung racun untuk medis). Dan bahkan dihukumi wajib, manakala sebuah kewajiban tidak akan terpenuhi manakala tidak disertai merokok.

Dengan model transparansi fatwa seperti itu, publik lebih punya pilihan dan umat lebih terdidik. Saya tidak membayangkan, jika perokok yang rata-rata kiai akhirnya juga mengambil hukum sendiri, melawan fatwa MUI misalnya. Lalu ke mana wajah MUI? (Koran Sindo)

IV. LAIN-LAIN : T i d a k
Ada
V. EDITORIAL :

1. Masuk Telinga Kanan Keluar Telinga Kiri

Inilah penilaian yang tidak enak, sangat tidak enak, tapi harus disampaikan kepada publik, yaitu DPR tidak peduli dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Aspirasi itu didengar melalui telinga kanan, langsung keluar melalui telinga kiri.

Karena itulah, setiap kali DPR mengesahkan undang-undang selalu mendapat perlawanan keras dari publik.

Perlawanan terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang disahkan pekan lalu hanyalah secuil contoh. Ada banyak undang-undang yang telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materi. Hal itu mencerminkan DPR selama ini membuat undang-undang dengan suka-suka, tidak mengindahkan aspirasi masyarakat, bahkan menyimpang dari konstitusi.

Padahal, adalah kewajiban DPR menyerap aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang. Kewajiban itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundangan.

Di sana diatur soal asas pembentukan peraturan perundangan yang baik, antara lain berdasarkan asas keterbukaan.

Keterbukaan itu diwujudkan dalam berbagai ruang partisipasi masyarakat. Di antaranya, sebelum membahas rancangan undang-undang bersama pemerintah, DPR mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan kelompok masyarakat. DPR yang dibiayai uang negara rajin pula ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pembahasan peraturan perundangan. Bahkan, DPR pun melakukan studi banding ke luar negeri.

Mestinya, dengan melakukan semua kegiatan itu, tidak ada lagi kelompok masyarakat yang menentang disahkannya sebuah undang-undang, tetapi di sinilah letak persoalannya. Ruang partisipasi itu formalitas belaka. Aspirasi rakyat itu didengar anggota DPR dengan telinga kanan, lalu keluar lagi lewat telinga kiri.

Sebuah riset mengenai kinerja DPR selama 2005-2006 menunjukkan hanya sekitar 3% hasil dari rapat dengar pendapat umum yang memengaruhi keputusan DPR.

Ketidakpedulian DPR juga tampak pada buruknya tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat pengambilan keputusan. Dalam satu komisi yang beranggotakan sekitar 50 orang, menurut hasil riset itu, yang menghadiri rapat dengar pendapat umum maksimal 10 orang. Sangat keterlaluan, 80% anggota komisi adalah pembolos.

Penyebab utama aspirasi rakyat tidak diakomodasi dalam kebijakan publik yakni kondisi DPR hanyalah perpanjangan tangan partai. Anggota DPR merupakan boneka elite partai sehingga terputuslah tali mandat sebagai wakil rakyat dengan konstituen yang diwakilinya. Sepanjang pemilu tidak menggunakan sistem distrik, selama itu pula aspirasi rakyat dibungkamkan dan anggota DPR hanya menghamba kepada elite partai.

Ketentuan kuorum dalam rapat DPR juga harus diperbaiki. Kuorum yang hanya dihitung berdasarkan jumlah tanda tangan dalam daftar hadir harus diakhiri. Kuorum mesti dihitung berdasarkan kehadiran fisik anggota dewan dalam rapat.

Sejarah mencatat undang-undang yang dihasilkan DPR diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri cuma segelintir anggota dewan. Undang-Undang Mahkamah Agung, misalnya, hanya disetujui 90 orang dari 550 total anggota DPR. Persetujuan segelintir manusia itulah yang menentukan perjalanan nasib negeri yang dihuni 230 juta jiwa.

Tidak ada cara lain, rakyat harus memberikan sanksi keras kepada anggota DPR yang malas bersidang dan membungkam aspirasi rakyat. Mereka sudah tidak layak dipilih lagi dalam pemilu. (Media Indonesia)

Jakarta, 22 Desember 2008
Sub Direktorat Berita
Direktorat Informasi dan Media
Deplu